HAK NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Fransiska Novita Eleanora

Dosen Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta
Alamat: Perumahan Pamulang Estate Blok E.10 Nomor 1 Ciputat,
Tangerang Selatan Email: vita_eleanor@yahoo.com

Abstrak

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman akibat tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan putusan pengadilan, seseorang harus menjalani hukuman dipenjara. Namun dengan adanya sistem pemasyarakatan maka narapidana tetap dianggap sebagai manusia Indonesia seutuhnya, sehingga tetap diutamakan akan hak-haknya, dipulihkan, dibimbing, dan dibina yang nantinya kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dilihat dari aspek hak asasi manusia, sistem pemasyarakatan merupakan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana. Dengan sistem pemasyarakatan maka hak dari seorang narapidana tetap diutamakan dan menjadi perhatian khusus dari Pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum.

Abstract

Prisoners are persons who undergoing punishment for committed crimes. According to the verdict, a criminal shall be sentenced in prison. However, the rights of the prisoners are protected by the correctional system, and keep them as human being as a whole. They are rehabilitated, guided, and nurtured which the aim is to make them back to community after the sentencing is finished. From the point of view of human rights, the correctional system was made to protect the rights of criminal, where the criminal remains a priority for the government within the criminal justice system.

Kata kunci: narapidana, hak asasi manusia, pemasyarakatan

Indonesia merupakan negara hukum. Oleh sebab itu, siapapun yang bersalah akan ditindak atau diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada satu sisi, dalam penerapannya, walaupun hukum

dianggap sebagai pemberi sanksi pada pelanggarnya, di sisi lain harus dapat membina, mengarahkan, dan membimbing pelaku tersebut untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan sadar akan perbuatan-nya.

Pembinaan narapidana secara khusus diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menegaskan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang tua.¹

Terbaikannya pemenuhan hak-hak dasar narapidana, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang di dalamnya mencantumkan sepuluh prinsip pemasyarakatan, kemudian adanya beberapa hukum internasional, seperti konvensi hak-hak sipil dan politik, konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.² Sesungguhnya tidak dipenuhinya secara ideal hak-hak narapidana ini merupakan efek kesekian dari begitu kompleksnya masalah yang ada dalam lembaga

pemasyarakatan. Selama ini para narapidana telah dijejali dengan berbagai ketidakadilan dan pengingkaran hak-hak asasi narapidana sebagai manusia. Bagi narapidana yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, maka masalah-masalah seputar pemenuhan hak-hak asasi nabi ini menjadi begitu penting.

Sistem kepenjaraan Indonesia yang sebelumnya menganut berbagai perundangan warisan kolonial, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan UUD 1945, telah berangsur diubah dan diperbaiki. Pemikiran baru mengenai fungsi hukuman penjara, dicetuskan oleh Dr. Sahardjo pada tahun 1962, yang tercermin di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan demikian, sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan telah dihapus dan diubah dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, yang lebih mementingkan konsep pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan pilar yang memungkinkan penegakan hukum dan keadilan yang dapat mewujudkan serta menghargai hak asasi manusia karena lebih dikhususkan terhadap

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

² Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 15.

cita-cita ideal dalam pemenuhan hak-hak narapidana yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia Indonesia yang seutuhnya. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah ketentuan hukum mengenai hak narapidana dalam sistem kemasyarakatan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

Ketentuan Hukum tentang Narapidana

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Tahun 1968 menyebutkan bahwa tujuan dilakukan pemidanaan sebagai berikut: (a). untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, (b). untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, (c). untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana, dan (d).

pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Sementara tindak pidana berarti perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana. Perilaku tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau objek hukum tertentu. Sebenarnya pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah proses terakhir dari proses peradilan pidana yang didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan sebagai pedoman proses dan pelaksana dari putusan hakim yang berakhir pada pembinaan kepada narapidana adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.³

Kejahatan merupakan perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana. Menurut **Bemmelen**, kejahatan adalah perilaku yang merugikan (merusak) dan asusila yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan

³ Didik Budi Waluyo, *Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan*, <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/metadata/pdf.jsp?id=100235>

mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap pelaku. Jadi narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (*aturan-aturan*) oleh alat-alat kekuasaan (*negara*) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana (Kejahatan)

Sebagai salah satu perbuatan yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan (tindak pidana) merupakan masalah sosial, yaitu masalah di tengah-tengah masyarakat, di mana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Penyebab kejahatan karena faktor internal dan eksternal. Ada lima faktor internal (dari dalam individu). *Pertama*, faktor bawaan individu yang dibawa dari gen. Salah satu faktor yang mendasari timbulnya perilaku kejahatan, yaitu faktor bawaan yang dimiliki individu semenjak lahir. Faktor bawaan tersebut berupa gen-gen yang diturunkan dari orang tuanya. *Kedua*, lemahnya kemampuan pertahanan diri. Individu memiliki kemampuan pertahanan diri yang kurang dalam menolak ajakan untuk

melakukan tindak kejahatan atau menghindari dari perilaku yang mengarah pada tindak kejahatan. *Ketiga*, kurang memiliki kemampuan penyesuaian diri. Penyesuaian diri, yaitu kemampuan individu dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. *Keempat*, kurangnya keimanan yang dimiliki individu. Tingkat keimanan yang dimiliki oleh individu mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada tiga faktor eksternal (dari luar diri pelaku). *Pertama*, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Penyebab perilaku kejahatan yang berasal dari lingkungan keluarga antara lain, anak kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. *Kedua*, faktor ekonomi, menjadi salah satu penyebab terjadinya perilaku kejahatan karena tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kemampuan ekonomi (kekayaan), individu akan melakukan apa saja dalam memenuhi kebutuhan salah satunya dengan melakukan tindak kejahatan. *Ketiga*, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga menjadi salah satu penyebab munculnya tindak kejahatan. Padahal kondisi ekonomi tidak mendukung sehingga muncul tindak kejahatan dengan motif pemenuhan kebutuhan hidup.

Untuk membantu atau mengklarifikasikan atau menentukan suatu perbuatan ke dalam kejahatan atau tidak maka dapat dilihat unsur-unsur kejahatannya yang terdiri atas: harus

ada perbuatan manusia, perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan hukum pidana, harus terbukti adanya dosa pada orang yang melakukan tindak kejahatan, perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, dan terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman dalam undang-undang.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh Pengadilan atas perbuatan tersebut. Penetapan aturan hukum pidana merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwaliki oleh para pembentuk undang-undang.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat.

Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses di mana interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Sistem Kepenjaraan dan Sistem Pemasyarakatan

Narapidana dalam lembaga pemasyarakatan harus dibina, dibimbing, dan diarahkan agar kelak setelah menjalani masa hukumannya kembali ke masyarakat dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Namun, pada saat narapidana berada dalam masa tahanan, aparat penegak hukum memperlakukan narapidana dengan tindakan sewenang-wenang dan hal tersebut didasarkan kepada sistem yang dianut Indonesia. Pada saat itu ada 2 (dua) sistem, yaitu sistem kepenjaraan dan kemasyarakatan.

SISTEM KEPENJARAAN	SISTEM PEMASYARAKATAN
<ul style="list-style-type: none">• Liberalisme-Individualisme• Narapidana dianggap sebagai <i>objek</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pancasila dan UUD 1945• Narapidana di samping <i>objek</i>, juga merupakan subjek
<ul style="list-style-type: none">• Tidak diperkenalkan kepada masyarakat	Tidak terlepas dari masyarakat
<ul style="list-style-type: none">• Di dalam memperbaiki narapidana lebih banyak mempergunakan kekerasan / unsur penjaraan dalam penjara	<ul style="list-style-type: none">• Di dalam memperbaiki narapidana lebih banyak mempergunakan kekuatan unsur/ yang ada dalam masyarakat
<ul style="list-style-type: none">• Mengakui narapidana sebagai manusia yang sudah tidak ada gunanya lagi	<ul style="list-style-type: none">• Mengakui narapidana sebagai manusia yang harus dikembalikan martabatnya sebagai manusia

Dari sistem kepenjaraan beralih ke sistem pemasyarakatan yang dipelopori oleh Dr. Sahardjo, S.H., pada tanggal 5 Juli 1963. Konsepsi Pemasyarakatan menggambarkan bahwa tujuan pidana penjara atau tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu, dan sebagai anggota masyarakat. Dalam proses pembinaan narapidana, faktor yang sangat penting adalah masyarakat di samping petugas.

Sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila memperlakukan narapidana menurut kepribadian bangsa memperhatikan beberapa hal. *Pertama*, tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia walaupun tersesat. Tidak boleh ditonjolkan bahwa ia adalah penjahat. Sebaliknya, ia harus dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. *Kedua*, tiap orang adalah makhluk masyarakat. Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna. Minimum tidak melanggar norma hukum. *Ketiga*, narapidana hanya dijatuhi pidana berupa hilang kemerdekaan Bergeraknya. Jadi

secara berangsur-angsur harus diusahakan melalui pembinaan agar setelah mereka kembali ke masyarakat tidak menjadi canggung lagi.

Pada umumnya, tujuan Pemasyarakatan ialah membina para tunawarga agar setelah menjalankan masa pidananya dapat menjadi manusia yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan dapat hidup selamat di dunia dan akhirat.⁴ Karena itu, tujuan pemasyarakatan dapat dibagi dua. *Pertama*, tujuan jangka pendek, yakni membimbing para narapidana agar kelak menjadi orang yang baik. Hal ini tentu saja memerlukan situasi, parasarana alat-alat, baik materi maupun non-materi, yaitu hal mengenai pendidikan kejiwaan/keagamaan yang harus diikuti dengan keterampilan, kejujuran dan lain-lain. *Kedua*, tujuan jangka panjang, yakni selain membimbing terpidana menjadi baik, juga harus diarahkan kepada mereka agar mereka tidak menjadi pelanggar hukum lagi.

Pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan meliputi (a). Bimbingan Kemasyarakatan, yakni dengan memberikan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan; (b). Bengkel kerja narapidana, yakni dengan memberikan pendidikan bimbingan ketrampilan sehingga mereka bekerja bukan hanya sekedar mengisi waktu luang; (c). Dewan Pembina Kemasya-

⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: UNDIP, 2002), hlm. 32.

rakatan bertugas menentukan seorang narapidana sudah atau belum dipekerjakan di luar tembok; (d) Direktorat Bisp (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) bertugas memberikan bimbingan di luar lembaga pemasyarakatan, terhadap narapidana yang menjalani cuti.

Saat ini pembinaan narapidana dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan satu kesatuan proses yang bersifat terpadu. *Pertama*, tahap admisorientasi. Tahap ini bermula sejak narapidana masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai dengan sepertiga masa pidananya. Pada tahap ini diadakan penelitian untuk mengetahui segala hal-hwal narapidana termasuk sebab-sebabnya melakukan tindak pidana, pengumpulan keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarganya, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, korban tindak pidana serta petugas instansi lain yang pernah menangani perkaranya. *Kedua*, tahap *medium security*. Jika proses pembinaan narapidana telah berlangsung sepertiga dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya dan menurut pendapat Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah dicapai kemajuan yang cukup berarti, antara lain ia telah menunjukkan keinsafan, perbaikan

disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan *medium security*. Lamanya tahap ini ialah sejak sepertiga hingga setengah masa pidananya.⁵ *Ketiga*, tahap asimilasi. Tahap ini bermula sejak dijalannya setengah hingga dua pertiga dari masa pidananya. Dalam jangka waktu tersebut, jika Dewan Pembina Pemasyarakatan memandang telah cukup kemajuan fisik maupun mental serta ketrampilan maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya narapidana mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, namun dalam pelaksanaannya masih tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan. *Keempat*, tahap integrasi. Jika dalam jangka waktu dua pertiga dari masa pidananya telah dijalani maka narapidana tersebut dapat diberikan pelepasan bersyarat yang pengusulannya ditetapkan oleh Dewan Pembinaan Pemasyarakatan.

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana harus menggunakan empat komponen prinsip-prinsip pembinaan yang terdiri atas pembinaan terhadap diri sendiri, yakni harus melakukan proses pembinaan

⁵ Antonio Cessasse, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2002), hlm. 64.

bagi diri sendiri, agar mampu untuk merubah diri ke arah perubahan yang positif, pembinaan dari keluarga, yaitu keluarga harus aktif dalam membina narapidana, pembinaan dari masyarakat, yaitu selain dukungan dari narapidana sendiri dan keluarga, masyarakat di mana narapidana tinggal mempunyai peran dalam membina narapidana. Masyarakat tidak boleh mengasingkan bekas narapidana dalam kehidupan sehari-hari, dan pembinaan dari petugas pemerintah dan kelompok masyarakat. Komponen yang terakhir ini sangat menentukan keberhasilan pembinaan narapidana. Dengan adanya pembinaan dari empat komponen itu berharap tujuan pemasyarakatan dapat tercapai, yakni memasukkan bekas narapidana ke dalam masyarakat sebagai warga yang baik, melindungi masyarakat dari kambuhnya kejahatan bekas narapidana dalam masyarakat karena tidak mendapat pekerjaan, dan perubahan pandangan dalam memperlakukan narapidana yang didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud manifestasi Pancasila, sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengakui hak-hak asasi narapidana.

Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan terdiri atas pembinaan di dalam lembaga, yang

meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, kursus ketrampilan, rekreasi, olah raga, kesenian, kepramukaan, latihan kerja asimilasi, sedangkan pembinaan diluar lembaga antara lain bimbingan selama terpidana, mendapat bebas bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

Hak-Hak Narapidana

Hak narapidana merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak-hak tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶ Sedangkan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) 1948 tercantum *unalienable rights of all members of human family* (hak-hak yang paling mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari manusia), yaitu hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi (Pasal 3).

⁶ Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), him. 27.

Larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak (Pasal 4). Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam (Pasal 5). Hak atas pengakuan hukum (Pasal 6). Hak atas persamaan di hadapan hukum dan atas non-diskriminasi dalam pemberlakuannya (Pasal 7). Hak atas pemulihan (Pasal 8). Larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang (Pasal 9). Hak atas pengadilan yang adil (Pasal 10). Praduga takbersalah dan larangan terhadap hukum *ex post facto* (Pasal 11). Hak memiliki kewarganegaraan (Pasal 16). Hak untuk memiliki kekayaan (Pasal 17). Kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama (Pasal 18).

Hak atas perlindungan hukum bagi narapidana juga dirumuskan dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Selanjutnya, diper-tegas kembali dalam Pasal 5 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, yang berhak menuntut dan memperoleh

perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjelaskan dengan tegas persamaan hak dan perlakuan serta perlindungan di mata hukum. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, baik itu orang baik-baik maupun narapidana. Dengan ketentuan tersebut maka setiap bentuk penyiksaan, penganiayaan, atau tindak kekerasan apapun, narapidana mempunyai hak yang sama di mata hukum untuk dilindungi dan menuntut keadilan atas kerugian yang dideritanya.⁷

Hak-Hak Asasi manusia yang melekat pada diri seorang narapidana lebih lanjut secara spesifik dijabarkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak itu adalah melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan; mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; menerima kunjungan keluarga,

⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: UNDIP, 2004), hlm. 56.

penasihat hukum atau orang tertentu lainnya; mendapat pengurangan masa pidana (*remisi*); mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas; mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Pemasyarakatan mengatur setidaknya ada 3 (tiga) hak narapidana yang diberikan apabila narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu. *Pertama*, mengadakan hubungan terbatas dengan pihak luar. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Selama menjalani masa hukumannya, seorang narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Caranya berupa surat menyurat dan kunjungan keluarga. *Kedua*, memperoleh remisi. Setiap 17 Agustus 1945, berdasarkan Kepres Nomor 5 Tahun 1987, setiap narapidana yang berkelakuan baik, telah berjasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan narapidana yang membantu kegiatan dinas LAPAS akan memperoleh remisi. *Ketiga*, memperoleh asimilasi. Selama

kehilangan kemerdekaannya, seorang narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Asimilasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu asimilasi ke dalam (hadirnya masyarakat ke dalam lembaga pemasyarakatan) dan asimilasi ke luar (hadirnya narapidana di tengah-tengah masyarakat). Selain itu, narapidana memperoleh cuti dan pembebasan bersyarat. Hak ini merupakan hak pengintegrasian narapidana, yaitu hak narapidana untuk sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat narapidana tersebut telah menjalani 2/3 dari masa hukumannya. Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat ini tetap diawasi oleh Bapas dan Jaksa setempat.⁸

Sistem pemasyarakatan adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang membentuk suatu kesatuan yang integral membentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi, yang berisi unsur edukatif, korektif, defensif dan yang beraspek individu dan sosial. Bertolak dari pemahaman mengenai sistem pemasyarakatan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari pembinaan narapidana itu sendiri

⁸ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, (Jakarta: Peradaban, 2007), hlm. 22.

tidak lain adalah rehabilitasi dan resosialisasi narapidana dengan menyertakan unsur-unsur edukatif, korektif dan defensif. Pembinaan ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang tidak bernilai edukatif, korektif dan defensif dalam proses pembinaan tidak dibenarkan, apalagi tindakan-tindakan yang memenuhi tindak pidana seperti halnya penyiksaan ataupun penganiayaan.

Tindak pidana yang kerap kali menimpa narapidana di dalam penjara adalah tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan di dalamnya, baik yang dilakukan oleh sesama narapidana, maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Dalam *Declaration Against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment* (adopted by the general assembly, 9 Desember 1975), dengan tegas melarang semua bentuk penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia.

Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan

rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi. Demi menghindari tindakan yang mengandung penyiksaan atau bentuk kekerasan lainnya maka pembinaan narapidana harus didasarkan atas pedoman-pedoman yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Menurut Muladi, pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *therapeutic process*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu. Tindakan kekerasan apapun tidak dibenarkan sebagai salah satu metode pembinaan narapidana. Konsep ini harus dipahami oleh setiap narapidana. Menurut Pasal 5 *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* bahwa takseorang petugas penegak hukumpun boleh menimbulkan, mendorong atau menoleransi tindakan penyiksaan - juga tidak dapat mengemukakan perintah atasan atau keadaan luar biasa - sebagai pembenaran penyiksaan. Selanjutnya

kembali dipertegas Pasal 10.1 *International Covenant Civil Politic Rights* (ICCPR) bahwa semua orang yang dicabut kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusiawi mereka. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan terhadap narapidana. Oleh karena itu, narapidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusia mereka.⁹

Pada hakikatnya, sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam rangka mencapai tujuan pembinaan narapidana maka sistem kepenjaraan ini memberi pedoman yang disebut sepuluh prinsip pemasyarakatan. *Pertama*, orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan

berguna dalam masyarakat. *Kedua*, penjatuh pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara. *Ketiga*, rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan. *Keempat*, negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. *Kelima*, selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. *Keenam*, pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara. *Ketujuh*, bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila. *Kedelapan*, tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat. *Kesembilan*, narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. *Kesepuluh*, sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dalam perkembangannya, sistem pemasyarakatan di Indonesia seringkali mendapat kritikan tajam

⁹ Loebby Lukman, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Penerbit Data Com, 2002), hlm. 32.

karena dianggap tidak berhasil dalam menyelenggarakan pembinaan pada para narapidana dan masih menyisakan metode-metode kolonial, sehingga melanggar hak asasi manusia dari narapidana.¹⁰ Namun, ditinjau dari undang-undang HAM dan undang-undang pemasyarakatan, sebenarnya perlindungan hukum hak asasi manusia dari narapidana sebagian besar telah diatur dalam kedua undang-undang tersebut. Dengan kata lain, kedua undang-undang itu telah cukup memberikan perlindungan bagi narapidana.

Dalam peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana yang disepakati oleh kongres pertama PBB di Jenewa tahun 1955 dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan resolusinya tanggal 31 Juli 1975 dan tanggal 13 Mei 1977 menyebutkan bahwa pelayanan narapidana adalah perlakuan terhadap orang-orang yang dihukum di penjara atau tindakan yang serupa tujuannya haruslah sejauh mana hukumnya mengizinkan, untuk menumbuhkan di dalam diri mereka kemauan untuk menjalani hidup mematuhi hukum serta memenuhi kebutuhan diri sendiri setelah bebas.

Pelayanan narapidana pada intinya adalah pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-

hak dan kewajiban narapidana berupa perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan. Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsionalnya sebagai penegak hukum. Fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai penegak hukum sangat ditentukan dengan pelayanannya.

Adapun bentuk-bentuk pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan adalah:

1. Pelayanan Umum. Pelayanan umum adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana sebagaimana biasanya sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di Lapas. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas tersebut diperlukan tersedianya ketenagaan, peralatan, tempat/ruang pelayanan kesehatan, obat-obatan, ruang lingkup pelayanan.
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus. Di samping pelayanan kesehatan umum di Lapas juga ada pelayanan kesehatan khusus karena sifat dan jenis penyakitnya yang memerlukan penanganan secara spesifik dan profesional kepada penderita narapidana. Jenis penyakit tersebut seperti

¹⁰ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 42.

TBC, HIV/AIDS, jiwa, dan wanita hamil/melahirkan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara khusus di Lapas maka pengadaan tenaga medis dan para medis dilakukan melalui kerjasama dengan dinas kesehatan setempat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Kesehatan dan Makanan bagi Narapidana

Pengertian terhadap pelayanan minimal belum banyak dipahami secara luas oleh masyarakat. Pemahaman standar pelayanan minimal secara memadai bagi masyarakat merupakan hal yang signifikan karena berkaitan dengan hak-hak konstitusional perorangan maupun kelompok masyarakat yang harus mereka peroleh dan wajib dipenuhi oleh Pemerintah, berupa tersedianya pelayanan yang harus dilaksanakan Pemerintah kepada masyarakat. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757/OTDA dan Penggunaan standar pelayanan minimal agar masing-masing institusi.

Pemerintah memiliki kesamaan persepsi dan pemahaman serta tindak lanjut dalam penyelenggaraan standar pelayanan minimal. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757/OTDA tanggal 8 Juli 2002, dirumuskan bahwa standar pelayanan minimal adalah tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah

yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Standar pelayanan minimal harus mampu menjalin terwujudnya hak-hak individu serta menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai patokan dan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas maka melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.03.PP.02.10 tahun 2003 telah ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan dan makanan narapidana di Lapas adalah berupa pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan pertama, rujukan penderita dilakukan secara seadanya, tergantung kondisi pada masing-masing Lapas, dan bentuk-bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dilakukan secara sistematis.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 menyebutkan beberapa hak yang berlaku juga terhadap narapidana yang di antaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum. Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Hak-hak narapidana secara garis besar meliputi hak-hak umum, yang secara langsung dapat diberikan kepada narapidana di Lapas tanpa syarat-syarat tertentu yang bersifat khusus dan hak-hak khusus yang hanya diberikan kepada narapidana di Lapas yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat khusus, yakni persyaratan substantif dan administratif. Adapun hak-hak yang bersifat umum tersebut adalah hak melakukan ibadah, hak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hak menyampaikan keluhan, hak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa, hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, hak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu. Sedangkan hak-hak khususnya adalah hak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, hak mendapatkan kesempatan mendapatkan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, hak mendapatkan pembebasan bersyarat, dan hak mendapatkan cuti menjelang bebas.

Penutup

Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia narapidana telah cukup dilindungi undang-undang hak asasi manusia dan undang-undang pemasyarakatan. Perlindungan

hukum dalam bentuk pembinaan yang diorientasikan pada rehabilitasi dan resosialisasi narapidana. Adapun sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada resolusi dan memulihkan narapidana agar jika kembali ke masyarakat tidak mengulangi lagi perbuatannya dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang lebih menekankan narapidana sebagai objek yang patut diberi hukuman dan sanksi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap narapidana harus menjadi perhatian khusus dari aparat penegak hukum dan pegawai lembaga pemasyarakatan karena pembinaan narapidana lebih mengutamakan memulihkan atas perbuatannya selama melakukan tindak pidana, bukan dididik dengan metode kekerasan. Selain itu, perangkat aturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap narapidana khususnya berkaitan dengan hak-haknya harus menjadi perhatian Pemerintah secara umum dan masyarakat secara khusus.

Daftar Pustaka

- Antonio Cessasse. 2002. *Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Bambang Purnomo. 2003. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*

- Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Didik Budi Waluyo. *Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan*. <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/metadata/pdf.jsp?id=100235>
- Loebby Lukman. 2002. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Data Com.
- Masyhur Effendi. 2004. *Hak-Asasi Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP.
- MVD Napitupulu, Jurnal Vesta, Pasca UNHAS, *Penegakan Hak Asasi Manusia terhadap Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Manado*, Volume 9 No. 12, 2007.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: UNDIP.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2007. *Ketika Kejahatan Berdaulat*. Jakarta: Peradaban.